

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

1. Pelaksanaan kegiatan PTSL tahun anggaran 2020 berjalan seiring dengan munculnya virus covid-19 yang mengakibatkan semua rancangan kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang telah disusun dari tahap perencanaan hingga tahap penerbitan sertipikat mengalami perubahan. Bahkan petunjuk teknis juga mengalami beberapa revisi yang tentunya akan membuat proses kegiatan PTSL akan berubah. Mulai dari perubahan anggaran, target, strategi di lapangan bahkan penyerahan sertipikat yang akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini tentu menambah daftar hambatan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi baru dan inovasi-inovasi baru untuk menyelesaikan target dengan tepat waktu.
2. Hambatan dalam pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
 - a. Hambatan Eksternal
 - 1) Antusias masyarakat/minatnya masyarakat
 - 2) Pihak desa tidak berkerja sama (*cooperative*)
 - 3) Alas hak tidak lengkap atau dokumen tidak tersedia
 - 4) Bidang yang didalam tidak sesuai dengan alas hak
 - 5) Pemohin berada diluar wilayah

- 6) Petunjuk batas tidak tahu sejarah tanahnya
 - 7) Sengketa waris
 - 8) Sengketa lahan
 - 9) Sengketa batas
- b. Hambatan Internal
- 1) Petunjuk teknis/ juknis berubah berkali-kali
 - 2) Koordinasi puldadis dan puldasik tidak efisien
 - 3) Banyak berkas tidak ada bidang dan banyak bidang tidak ada berkas
- c. Hambatan pada masa COVID-19
- 1) Penyuluhan dibatasi
 - 2) Anggaran dikurangi
 - 3) Target dikurangi
 - 4) Petugas lapang sulit bertemu dengan pemohon

B. Saran

Pandemi covid-19 mengakibatkan banyak hambatan terhadap pelaksanaan kegiatan PTSL seperti yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya. Sehingga di butuhkan strategi dan inovasi baru untuk menyelesaikan target dengan tepat waktu. Di harapkan kepada pemerintah agar melakukan pembahasan perubahan program kegiatan PTSL di masa pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arba. H.M ,2015, *Hukum Agraria Indonesia*, jakarta: Sinar grafika.

Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Istiqamah, *Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Tanah*, Jurnal

Jurisprudentie Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Volume 5 Nomor 2 Juni 2018

M. Syamsudin, 2007. *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ronny Hanitijo Soemitro , 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, jakarta: Ghalia Indonesia.

Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, malang: setara press kelompok intrans publishing.

Samun Ismaya, 2011. *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).

Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kementerian kesehatan Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 27 tahun 2017 *tentang pedoman PPI. Pencegahan dan pengendalian infeksi (ppi).*

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2017. *Pedoaman kesiapsiagaan menghadapi MERSCov di indonesia.*

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

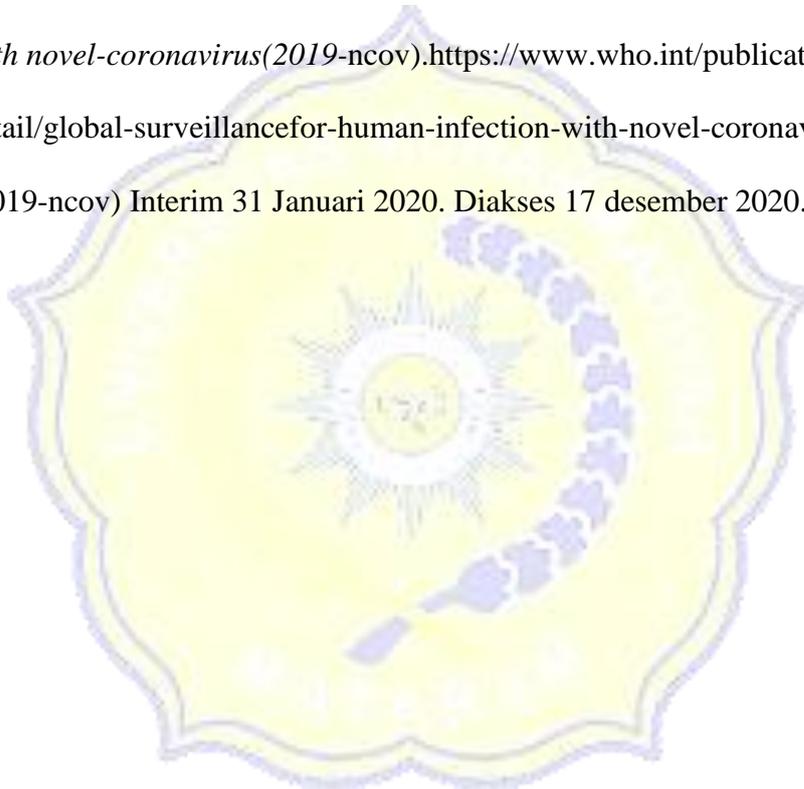
INTERNET

Channel New Asia (2020) Wuhan virus outbreak 15 medical workers infected, 1
in critical condition [Homepage on the internet]. Cited Jan 28th 2020.

Available on:[https://www.channelnewsasia.com/news/asia](https://www.channelnewsasia.com/news/asia/wuhan-pneumonia-outbreak-health-workers-coronavirus-12294212)

[wuhan-pneumonia-outbreak-health-workers-coronavirus-12294212](https://www.channelnewsasia.com/news/asia/wuhan-pneumonia-outbreak-health-workers-coronavirus-12294212)

World Health Organization (WHO).2020. *Global surveillance for human infection
with novel-coronavirus(2019-ncov)*.[https://www.who.int/publications-
detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-
\(2019-ncov\)](https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)) Interim 31 Januari 2020. Diakses 17 desember 2020.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jln Sukarno - Hatta Giri Menang Gerung Email: Bpn.lobar@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NOMOR: 64.a /KEP-100.PTSL/III/2019

TENTANG

**REVISI KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK
BARAT NOMOR 46/KEP-100.PTSL/II/2019 TANGGAL 04 FEBRUARI 2019
TENTANG SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN
TUGAS YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

**DESA: PENIMBUNG, MAMBALAN, KEKERI, MIDANG, GUNUNG SARI,
SESELA, JATISELA, MEKARSARI, RANJOK. KECAMATAN: GUNUNG SARI
DESA: BABUSSALAM KECAMATAN: GERUNG
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019**

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor perlu membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa: Penimbung, Mambalan, Kekeri, Midang, Gunung Sari, Sesela, Jatisela, Mekarsari, Ranjok, Kecamatan: Gunung Sari, dan Desa: Babussalam Kecamatan: Gerung, Kabupaten: Lombok Barat Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

DELAPAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 12 Maret 2019

KEPALA KANTOR PERTANAHAN/
KABUPATEN LOMBOK BARAT

I MADE ARYA SANJAYA, S.H., M.H.
NIP. 196905101993031002

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
3. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Bupati Lombok Barat.

- a. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
- b. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah;
- c. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan
- d. menandatangani Gambar Ukur dan seluruh dokumen dan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah; dan
- e. membuat peta pendaftaran tanah sebagai dasar pengumpulan data fisik dan data yuridis

KELIMA

Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Yuridis mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/ penguasaan bidang tanah;
- b. memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
- c. membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
- d. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
- e. menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
- f. menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;
- g. menyiapkan data untuk pembuatan Daftar Isian dan pemeriksaan sertifikat; dan
- h. menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.

KEENAM

Satgas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Administrasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan surat-surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan administratif lainnya;
- b. menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan unit kerja lain yang dianggap perlu;
- c. menyiapkan daftar hadir;
- d. membuat laporan hasil rapat;
- e. menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
- f. membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
- g. menyiapkan pencetakan/penjahitan sertifikat; dan
- h. mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan.

KETUJUH

Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor: DIPA-056.01.2.432150/2019 tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN.

- Menetapkan REVISI KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 46/KEP-100/PTSL/II/2019 TANGGAL 04 FEBRUARI 2019 TENTANG REVISI SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DESA: PENIMBUNG, MAMBALAN, KEKERI, MIDANG, GUNUNG SARI, SESELA, JATISELA, MEKARSARI, RANJOK, KECAMATAN: GUNUNG SARIDAN DESA: BABUSSALAM KECAMATAN: GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019
- KESATU Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 Surat Keputusan ini sebagai anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk melaksanakan pendaftaran tanah sistematis Lengkap di Desa: Penimbung, Mambalan, Keker, Midang, Gunung Sari, Sesela, Jatisele, Mekarsari, Kecamatan: Gunung Sari, dan Babussalam Kecamatan Gerung, Kabupaten: Lombok Barat Tahun 2019.
- KEDUA Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel.
Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas:
a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;
b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya,
c. memberikan asistensi Terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak,
h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan, dan
i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
- KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik), Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis), dan Satuan Tugas Administrasi (Satgas Administrasi), dengan susunan keanggotaan Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-2, Lampiran-3 dan Lampiran-4 Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Fisik mempunyai tugas.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Tanggal : 2
Januari 2019 Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap Nomor : 6.a/BA52.01.100.1/1/2019

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
 Nomor : 64.a/KEP-100.PTSL/III/2019
 Tanggal : 12 MARET 2019
 Lampiran : 6
 Hal : KONTROL KUALITAS PENGUKURAN

| NO | NAMA PETUGAS/NIP | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | WILAYAH KERJA |
|----|---|---|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | I MADE ARYA SANJAYA, S.H., M.H. NIP. 19690510 199303 1 002 | KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT | KONTROL KUALITAS PENGUKURAN | 1. PENIMBUNG 2. MAMBALAN |
| 2. | RURY IRAWAN, S.SiT. NIP. 19760118 199503 1 001 | KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR PERTANAHAN | KONTROL KUALITAS PENGUKURAN | 3. KEKERI 4. MIDANG |
| 3. | MUHAMMAD ZARNUJI, S.Tr. NIP. 19870405 200903 1 001 | Kepala Sub. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan Dasar dan Tematik Pertanahan | KONTROL KUALITAS PENGUKURAN | 5. GUNUNG SARI 6. SESELA |
| 4. | MAULYNA SRI AUGUSTIA, ST NIP. 19860816 201101 2 010 | Kepala Seksi Penataan Pertanahan | KONTROL KUALITAS PENGUKURAN | 7. JATISELA 8. MEKAR SARI |
| 5. | DARMAWAN WIBOWO, S.ST NIP. 19790312 199903 1 002 | Kepala Seksi Pengadaan Tanah | KONTROL KUALITAS PENGUKURAN | 9. RANJOK 10. BABUSSALAM |
| 6. | H. MASTUR, S.H. NIP. 19621231 199010 1 003 | | KONTROL KUALITAS PENGUKURAN | |

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN LOMBOK BARAT

I MADE ARYA SANJAYA, S.H., M.H.
 NIP. 19690510199 3031002

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat

Nomor : 64.a /KEP-100.PTSL/III/2019

Tanggal : 12 MARET 2019

Lampiran : 5

HAL : KOORDINATOR TIM SATUAN TUGAS FISIK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

| NO | NAMA PETUGAS/NIP | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | WILAYAH KERJA |
|-------|---|--|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TIM 1 | | | | |
| 1. | MAULYNA SRI AUGUSTIA, ST NIP. 19860816 201101 2 010 | Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan Dasar dan Tematik Pertanahan | KETUA (merangkap Koordinator) | 1. PENIMBUNG |
| 2. | PRASETYO TRI WANDANI NIP. 1920116 201801 1 001 | Staf Sub.Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral | KOORDINATOR | 2. MAMBALAN 3. MEKAR SARI 4. KEKERI |
| TIM 2 | | | | |
| 1. | ILHAM JAUHARI, S.Tr. NIP. 19870812 200903 1 001 | Kepala Sub.Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu | KETUA (merangkap Koordinator) | 1. MIDANG |
| 2. | ISMED FATURRAHMAN MAULANA NIP. 19901015 200912 1 001 | Staf Sub.Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral | KOORDINATOR | 2. RANJOK 3. BABUSSALAM |
| TIM 3 | | | | |
| 1. | MUHAMMAD ZARNUJI, S.Tr. NIP. 19870405 200903 1 001 | Kepala Sub.Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral | KETUA (merangkap Koordinator) | 1. GUNUNG SARI |
| 2. | SAHLAN ROFIQI, A.P NIP. 19900327 201801 1 002 | Staf Sub.Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral | KOORDINATOR | 2. SESELA 3. JATISELA |

K
K
A
K
P
E
R
T
A
N
A
H
K
A
B
U
P
A
T
E
N
L
O
M
B
O
K
B
A
R
A
T
A

I MADE ARYA SANJAYA, S.H., M.H.
NIP. 196905101993031002

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|--------------------------------------|--|
| 3. | TIM 3 | | | |
| | 1. MUHAMMAD ZARNUJI, S.Tr. NIP. 19870405 200903 1 001 | Kepala Sub.Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral | Satgas Fisik (merangkap Koordinator) | 1. GUNUNG SARI 2. SESELA 3. JATISELA |
| | 2. SAHLAN ROFIQI, A.P NIP. 19900327 201801 1 002 | Staf Sub.Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral | COORDINATOR | |
| | 3. ZULKIFLI NIP. - | Asisten Surveyior | PETUGAS UKUR | |
| | 4. SULISTINO NIP. - | Asisten Surveyior | PETUGAS UKUR | |
| | 5. RIANG BANI SAMUDRA NIP. - | Asisten Surveyior | PEMBANTU UKUR | |
| | 6. HANDANI APRIADI NIP. - | | PEMBANTU UKUR | |
| | 7. RAKSA DIRAKSA NIP. - | | PEMBANTU UKUR | |
| | 8. YENI INDRAYANI OKTAVIANA NO. LISENSI: 2-0552-14 | Asisten Surveyior | PEMBANTU UKUR | |
| | 9. AHMADI NIP. - | | PEMBANTU UKUR | |
| | 10. SIGITSANTOSO NIP. - | | PEMBANTU UKUR | |

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

I MADE ARYA SANJAYA, S.H., M.H.
NIP. 196905101993031002

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|--------------------------------------|---------------|
| 2. | TIM 2 | | | |
| | 1. ILHAM JAUHARI, S.Tr. NIP. 19870812 200903 1 001 | Kepala Sub.Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu | Satgas Fisik (merangkap Koordinator) | 1. MIDANG |
| | 2. ISMED FATURRAHMAN MAULANA NIP. 19901015 200912 1 001 | Staf Sub.Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral | KOORDINATOR | 2. RANJOK |
| | 3. BUHARI MUSLIM NIP. 19860126 201402 1 002 | Staf Sub.Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral | PETUGAS UKUR | 3. BABUSSALAM |
| | 4. ILAM FAULANA N NIP. - | Asisten Surveyior | PETUGAS UKUR | |
| | 5. AKHMAD KHATIB NIP. - | Asisten Surveyior | PEMBANTU UKUR | |
| | 6. AHMAD KASFYI NO. LISENSI: 2-0493-14 | Asisten Surveyior | PEMBANTU UKUR | |
| | 7. MUHAMMAD ERWANDI NIP. - | | PEMBANTU UKUR | |
| | 8. LALU SUARDIMAN NIP. - | PPNP | PEMBANTU UKUR | |
| | 9. TAMRIN HIDAYAT NIP. - | | PEMBANTU UKUR | |
| | 10. ALUNG NIZAMUDIN NIP. - | | PEMBANTU UKUR | |

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat

Nomor : 64.a /KEP-100.PTSL/III/2019

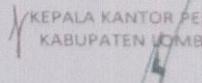
Tanggal : 12 MARET 2019

Lampiran : 4

HAL : SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS FISIK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

| NO | NAMA PETUGAS/NIP | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | WILAYAH KERJA |
|----|---|--|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TIM 1 | | | |
| | 1. MAULYNA SRI AUGUSTIA, ST NIP. 19860816 201101 2 010 | Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan Dasar dan Tematik Pertanahan | Satgas Fisik (merangkap Koordinator) | 1. PENIMBUNG |
| | 2. PRASETYO TRI WANDANI NIP. 1920116 201801 1 001 | Staf Sub,Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral | KOORDINATOR | 2. MAMBALAN |
| | 3. LALU GUNAWAN NO. LISENSI: 2-0190-13 | Asisten Surveyior | PETUGAS UKUR | 3. MEKAR SARI |
| | 4. WAHYUDIN NO. LISENSI: 2-0286-16 | Asisten Surveyior | PETUGAS UKUR | 4. KEKERI |
| | 5. MAULANA BAYU PRATAMA NO. LISENSI: 2-0288-16 | Asisten Surveyior | PEMBANTU UKUR | |
| | 6. DEWI MAHAHENDRA RIANA NO. LISENSI: 2-0503-14 | Asisten Surveyior | PEMBANTU UKUR | |
| | 7. Imam Ahmad A NIP. - | | PEMBANTU UKUR | |
| | 8. NI MADE AYU WULANTASTRI NO. LISENSI: 2-0537-14 | Asisten Surveyior | PEMBANTU UKUR | |
| | 9. RIDWAN | | PEMBANTU UKUR | |
| | 10. SAHRUL HADI | | PEMBANTU UKUR | |

| TIM 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|-------------------------------|----------------|---|
| 1. LALU FIRMAN SUKMAJAYA, S.H., M.H. NIP. 19860407 200912 1 005 | Kepala Sub.Seksi Pendaftaran Hak Tanah | Wakil Ketua merangkap anggota | 1. GUNUNG SARI | |
| 2. PUSPA JOHANA NIP. 19811231 200701 1 001 | Staf Sub.Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah | Sekretaris | 2. SESELA | |
| 3. WAHYU BUDI PURWANTO, SH. | PPNPN | Anggota | 3. JATISELA | |
| 4. BAIQ LENA SISKI SORAYANI, SP. | PPNPN | Anggota | | |


 KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN LOMBOK BARAT

I MADE ARYA SANJAYA, S.H., M.H.
 NIP. 196905101993031002

Jurusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat

Jumlah : 64 a /KEP-100.PTSL/III/2019

Tanggal : 12 MARET 2019

Lampiran : 3

HAL : SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS YURIDIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

| NO | NAMA PETUGAS/NIP | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | WILAYAH KERJA |
|----|--|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | TIM 1 | | | |
| | 1. LALU GIGIH FATRIANSAH, S.H. NIP. 19860521 200912 1 002 | Kepala Sub.Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan | Ketua merangkap anggota | 1. PENIMBUNG |
| | 2. ERNAWATI | PPNPN | Anggota | 2. MAMBALAN |
| | 3. ASTRIO FUJI HARJANTO S | PPNPN | Anggota | 3. MEKAR SARI |
| | 4. HILMAN JAHARI | PPNPN | Anggota | 4. KEKERI |
| 2. | TIM 2 | | | |
| | 1. N U R D A N NIP. 19651231 198701 1 003 | Kepala Sub.Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat | Wakil Ketua merangkap anggota | 1. MIDANG |
| | 2. RONY MAULANA ADEKANTARI | PPNPN | Anggota | 2. RANJOK |
| | 3. DWI ELI SAPUTRI | PPNPN | Anggota | 3. BABUSSALAM |
| | 4. AHMAD JUFRI SAHID, SH. | PPNPN | Anggota | |

| 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|------------------|---|
| 26. AMINUDIN, SH NRP. 74030627 | KASI HUMAS POLSEK GUNUNG SARI | PETUGAS PENYULUH | |
| 27. NURSIDI NRP. 761200777 | Ps. KANIT BINTIBMAS SAT BINMAS RES LOBAR | PETUGAS PENYULUH | |
| 28. MADE SURYA ADNYANA NRP. 79060921 | BA UNIT BINPOLMAS SAT BINMAS RES LOBAR | PETUGAS PENYULUH | |

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

MADE ARYA SANJAYA, S.H., M.H.
NIP. 196905101993031002

| 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------------------|---|
| 11. LALU FIRMAN SUKMAJAYA, S.H., M.H. NIP. 19860407 200912 1 005 | KEPALA SUB SEKSI PENDAFTARAN HAK TANAH | PETUGAS PENYULUH | |
| 12. ILHAM JAUHARI, S.Tr. NIP. 19870812 200903 1 001 | KEPALA SUB SEKSI PENATAGUNAAN TANAH DAN KAWASAN TERTENTU | PETUGAS PENYULUH | |
| 13. MUHAMMAD ZARNUJI, S.Tr. NIP. 19870405 200903 1 001 | KEPALA SUB SEKSI PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL | PETUGAS PENYULUH | |
| 14. N U R D A N NIP. 19651231 198701 1 003 | KEPALA SUB SEKSI PENETAPAN HAK TANAH DAN PEMBERDAYAAN HAK TANAH MASYARAKAT | PETUGAS PENYULUH | |
| 15. LALU GIGIH PATRIANSAH, S.H. NIP. 19860521 200912 1 002 | KEPALA SUB SEKSI PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN | PETUGAS PENYULUH | |
| 16. MAULYNA SRI AUGUSTIA, ST NIP. 19860816 201101 2 010 | Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan Dasar dan Tematik Pertanahan | PETUGAS PENYULUH | |
| 17. I GST. AYU ADNYAWATI, SH NIP. 19720202 199403 2 002 | Kepala Sub.Seksi Pengendalian, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar | PETUGAS PENYULUH | |
| 18. AL VICTOR PUJA BERLIAN, S.E. NIP. 19900216 201402 1 002 | Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian | PETUGAS PENYULUH | |
| 19. MIFTAH RULI HARTANTO, S.E. NIP. 19850701 200912 1 004 | Kepala Urusan Keuangan dan BMN | PETUGAS PENYULUH | |
| 20. BUDI SATRIANA, S.H. NIP. 19820713 200703 1 001 | INTELIJEN KEJARI MATARAM | PETUGAS PENYULUH | |
| 21. GUFRAN, S.H. NIP. 19841231 200912 1 004 | SIMKARI KEJARI MATARAM | PETUGAS PENYULUH | |
| 22. YUNISA AKBAR NIP. 19900620 201012 1 002 | INTELEJEN KEJARI MATARAM | PETUGAS PENYULUH | |
| 23. IPTU KAHAR MZ, S.H. NRP. 66030309 | KAPOLSEK GUNUNG SARI | PETUGAS PENYULUH | |
| 24. BRIGADIR SUGIANTO, S.Sos. NRP. 79120502 | BRIGADIR SAT RESKRIM POLRES MATARAM | PETUGAS PENYULUH | |
| 25. I KETUT ARINA NRP. 62110097 | WAKAPOLSEK GUNUNG SARI | PETUGAS PENYULUH | |

Pusatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat

Nomor : 64.a /KEP-100.PTSL/III/2019

Tanggal : 12 MARET 2019

Lampiran : 2

Hal : PETUGAS PENYULUH PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) WILAYAH KERJA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|------------------|----------------|
| | 1. I. MADE ARYA SANJAYA, S.H., M.H. NIP. 19690510 199303 1 002 | KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT | PETUGAS PENYULUH | 1. PENIMBUNG |
| | 2. HJ. NURHIDAYATI, S.Sos NIP.19690730 199903 2 002 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | PETUGAS PENYULUH | 2. MAMBALAN |
| | 3. RURY IRAWAN, S.SIT NIP.19760118 199503 1 001 | KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR PERTANAHAN | PETUGAS PENYULUH | 3. KEKERI |
| | 4. DARMAWAN WIBOWO, S.ST NIP. 19790312 199903 1 002 | KEPALA SEKSI PENATAAN PERTANAHAN | PETUGAS PENYULUH | 4. MIDANG |
| | 5. H. MASTUR, S.H. NIP. 19621231 199010 1 003 | KEPALA SEKSI PENGADAAN TANAH | PETUGAS PENYULUH | 5. GUNUNG SARI |
| | 6. SUBANDRIO, S.H. NIP. 19630319 198303 1 003 | Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan | PETUGAS PENYULUH | 6. SESELA |
| | 7. BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H., M.H. NIP. 19810623 200903 2 006 | Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan | PETUGAS PENYULUH | 7. JATISELA |
| | 8. BAIQ IRNI FATMANINGSIH IDJAR, S.IP. NIP. 19830310 200604 2 006 | KEPALA SUB SEKSI LANDREFORM DAN KONSOLIDASI TANAH | PETUGAS PENYULUH | 8. MEKAR SARI |
| | 9. DEWI LESTARI, S.H. NIP. 19780909 199803 2 004 | KEPALA SUB SEKSI PEMANFAATAN TANAH PEMERINTAH DAN PENILAIAN TANAH | PETUGAS PENYULUH | 9. RANJOK |
| | 10. CHRISTINE ERLINA RAHAYU, S.H. NIP. 19821225 200604 2 006 | KEPALA URUSAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | PETUGAS PENYULUH | 10. BABUSSALAM |

| | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|---|--|--|
| 3. TIM 3 | | | | |
| 1. H. MASTUR, S.H. NIP. 19621231 199010 1 003 | Kepala Seksi Pengadaan Tanah | Kepala Sub.Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral | Ketua Merangkap Anggota Wakil Ketua fisik yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota | 1. GUNUNG SARI 2. SESELA 3. JATISELA |
| 2. MUHAMMAD ZARNUJI, S.Tr. NIP. 19870405 200903 1 001 | | | | |
| 3. LALU FIRMAN SUKMAJAYA, S.H., M.H. NIP. 19860407 200912 1 005 | Kepala Sub.Seksi Pendaftaran Hak Tanah | Kepala Sub.Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah | Wakil Ketua Yuridis yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap anggota | |
| 4. DEWI LESTARI, S.H. NIP.19780909 199803 2 004 | | | | |
| 5. KEPALA DESA GUNUNG SARI KEPALA DESA SESELA KEPALA DESA JATISELA | | | Sekretaris ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA | |

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

I MADE ARYA SANJAYA, S.H., M.H.
NIP. 196905101993031002

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|--|---|
| 2. | TIM 2 | | | |
| | 1. DARMAWAN WIBOWO, S.ST NIP. 19790312 199903 1 002 | Kepala Seksi Penataan Pertanahan | Ketua Merangkap Anggota | 1. MIDANG 2. RANJOK 3. BABUSSALAM |
| | 2. ILHAM JAUHARI, S.Tr. NIP. 19870812 200903 1 001 | Kepala Sub.Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu | Wakil Ketua fisik yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota | |
| | 3. N U R D A N NIP. 19651231 198701 1 003 | Kepala Sub.Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat | Wakil Ketua Yuridis yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap anggota | |
| | 4. BAIQ IRNI FATMANINGSIH IDJAR, S.IP. NIP. 19830310 200604 2 006 | Kepala Sub.Seksi Landrefrom dan Konsolidasi Tanah | Sekretaris | |
| | 5. KEPALA DESA MIDANG | | ANGGOTA | |
| | KEPALA DESA RANJOK | | ANGGOTA | |
| | KEPALA DESA BABUSSALAM | | ANGGOTA | |

REVISI KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 46/KEP-100 PTSL/II/2019 TANGGAL 04 FEBRUARI 2019
TENTANG SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2019
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
Nomor : 64.a /KEP-100 PTSL/III/2019
Lampiran : 1
Tanggal : 12 MARET 2019

HAL : SUSUNAN TIM AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2019

| NO | NAMA PETUGAS/NIP | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | WILAYAH KERJA |
|----|--|---|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | TIM 1 | | | |
| 1. | RURY IRAWAN, S.SiT., M.H NIP. 19760118 199503 1 001 | Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan | Ketua Merangkap Anggota | 1. PENIMBUNG |
| 2. | MAULYNA SRI AUGUSTIA, ST NIP. 19860816 201101 2 010 | Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan Dasar dan Tematik Pertanahan | Wakil Ketua fisik yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota | 2. MAMBALAN 3. MEKAR SARI |
| 3. | LALU GIGIH FATRIANSAH, S.H NIP. 19860521 200912 1 002 | Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan | Wakil Ketua Yuridis yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap anggota | 4. KEKERI |
| 4. | IGST. AYU ADNYAWATI, SH NIP. 19720202 199403 2 002 | Kepala Sub Seksi Pengendalian, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar | | |
| 5. | KEPALA DESA PENIMBUNG | | Sekretaris | |
| | KEPALA DESA MAMBALAN | | ANGGOTA | |
| | KEPALA DESA MEKAR SARI | | ANGGOTA | |
| | KEPALA DESA KEKERI | | ANGGOTA | |

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat

Nomor : 64.a /KEP-100.PTSL/III/2019

Tanggal : 12 MARET 2019

Lampiran : 7

HAL : SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

| NO | NAMA PETUGAS/NIP | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | WILAYAH KERJA |
|----|--|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | TIM 1 | | | |
| | 1. I GST. AYU ADNYAWATI, SH NIP. 19720202 199403 2 002 | Kepala Sub. Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah | Ketua Satgas Administrasi merangkap anggota | 1. PENIMBUNG |
| | 2. SATRIA UNGGANA, S.H. | PPNPN | Anggota | 2. MAMBALAN |
| | 3. SUDIAH, S.H. | PPNPN | Anggota | 3. MEKAR SARI |
| | 4. AHMAD JUFRI SAHID, S.H. | PPNPN | Anggota | 4. KEKERI |
| | 5. TRIA ULANDARI, S.P | PPNPN | Anggota | |
| 2. | TIM 2 | | | |
| | 1. BAIQ IRNI FATMANINGSIH IDJAR, S.IP. NIP. 19830310 200604 2 006 | Kepala Sub. Seksi Landrefrom dan Konsolidasi Tanah | Ketua Satgas Administrasi merangkap anggota | 1. MIDANG |
| | 2. SATRIA UNGGANA, S.H. | PPNPN | Anggota | 2. RANJOK |
| | 3. SUDIAH, S.H. | PPNPN | Anggota | 3. BABUSSALAM |
| | 4. AHMAD JUFRI SAHID, S.H. | PPNPN | Anggota | |
| | 5. TRIA ULANDARI, S.P | PPNPN | Anggota | |
| 3. | TIM 3 | | | |
| | 1. DEWI LESTARI, S.H. NIP. 19780909 199803 2 004 | Kepala Sub. Seksi Pengendalian, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlarang | Ketua Satgas Administrasi merangkap anggota | 1. GUNUNG SARI |
| | 2. SATRIA UNGGANA, S.H. | PPNPN | Anggota | 2. SESELA |
| | 3. SUDIAH, S.H. | PPNPN | Anggota | 3. JATISELA |
| | 4. AHMAD JUFRI SAHID, S.H. | PPNPN | Anggota | |
| | 5. TRIA ULANDARI, S.P | PPNPN | Anggota | |

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

I MADE ARYA SANJAYA, S.H., M.H.
NIP. 196905101993031002